



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : BADAN KEBIJAKAN FISKAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ABDUROHMAN**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **798934**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 5.029.000.000**

1. Tanah Seluas 558 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 279.000.000
2. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL  
SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA  
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA  
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
5. Tanah Seluas 2030 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL  
SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 471 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL  
SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/102 m2 di KAB / KOTA  
BANJARNEGARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 379.000.000**

1. MOBIL, NISSAN JUKE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
90.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX 150 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI  
Rp. 12.000.000



4. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER PRIME 1,5 A/T Tahun 2022,  
HASIL SENDIRI Rp. 267.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.400.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	531.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.370.250.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.370.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.